

Partisipasi Digital Melalui Issue Framing, Digital Deliberation, dan Citizen Providing Ideas: Studi Gerakan #Indonesiagelap

Farahdiba Noor Rachmat

Universitas Indonesia

Email: farahdiba.noor41@ui.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gerakan #IndonesiaGelap pada platform media sosial X sebagai bentuk partisipasi digital warga dalam merespons kebijakan publik yang kontroversial pada awal tahun 2025. Berbeda dari studi-studi terdahulu yang cenderung memandang partisipasi digital sebatas keterlibatan simbolik atau ekspresif, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa warga berperan aktif dalam membangun narasi tandingan, memperluas diskusi publik, dan mengajukan gagasan kebijakan alternatif. Dengan menggunakan Critical Discourse Analysis (CDA) dan Qualitative Content Analysis (QCA) terhadap 30 tweet dengan engagement tinggi, penelitian ini menemukan bahwa issue framing dimanfaatkan untuk membingkai ulang isu melalui oposisi simbolik, metafora emosional, dan kritik satir, kemudian digital deliberation hadir dalam pertukaran opini, penyebaran data, dan koordinasi aksi kolektif, serta citizen providing ideas tampak dari perumusan 13 tuntutan utama yang menawarkan kebijakan di berbagai sektor strategis disertai penjelasan tuntutan, data pendukung, dan usulan solusi. Hasil ini menegaskan media sosial berpotensi sebagai ruang demokratis yang mengintegrasikan kritik, diskusi, dan rumusan kebijakan, sekaligus memperluas peran warga menjadi pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perumusan kebijakan publik.

Keywords: #IndonesiaGelap, Partisipasi Digital, Issue Framing, Digital Deliberation, Citizen Providing Ideas

Corresponding: Farahdiba Noor Rachmat

E-mail: farahdiba.noor41@ui.ac.id



PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2025, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan kontroversial yang memicu keresahan di kalangan masyarakat. Salah satu kebijakan yang paling banyak mendapat sorotan adalah pelarangan penjualan gas LPG tiga kilogram pada tingkat pengecer atau warung sejak tanggal 1 Februari 2025. Keputusan pemerintah ini dinilai mematikan pengusaha kecil dan bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo yang berpihak pada rakyat kecil (BBC, 2025).

Bersamaan dengan kebijakan tersebut, pemerintah juga memberlakukan kebijakan untuk pemangkasan atau efisiensi anggaran pada sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, 2025). Hal ini berdampak dengan kekhawatiran banyak pihak bahwa pengurangan dana akan berdampak langsung pada kualitas layanan dasar yang menjadi fondasi bagi kemajuan masyarakat (Conversation, 2025). Situasi ini dapat memperburuk kondisi sosial serta memperkuat persepsi publik bahwa negara semakin abai terhadap kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, muncul krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan terhadap legitimasi kekuasaan yang dijalankan. Oleh sebab itu, masyarakat memanfaatkan media sosial, khususnya platform X, sebagai ruang untuk menyuarakan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Hal tersebut karena X dapat berfungsi sebagai ruang digital tempat masyarakat menyalurkan kekecewaan secara kolektif serta memungkinkan terbentuknya narasi yang merefleksikan pengalaman kolektif masyarakat (Djamaluddin et al., 2023).

Salah satu bentuk nyata dari pemanfaatan ruang digital ini terlihat pada penggunaan tagar Indonesia Gelap atau #IndonesiaGelap yang menjadi trending topic di platform X pada tanggal 17 Februari 2025 dengan tercatat sebanyak 81.900 tweet di hari yang sama (Tempo, 2025). Tidak hanya itu, kampanye ini tidak hanya terbatas di ruang digital, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk aksi demonstrasi kolektif yang dilakukan secara langsung di berbagai daerah (BBC, 2025).

Tajuk #IndonesiaGelap merupakan “simbol” ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa. Hal ini dinyatakan oleh koordinator BEM SI, Satria Naufal, sebagai bentuk pemaknaan keresahan publik dalam menghadapi situasi sosial-politik yang tidak menentu (Tempo, 2025). Oleh karena itu, tagar #IndonesiaGelap memperlihatkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam membentuk wacana publik dan menyuarakan pandangan mereka, yang mana hal tersebut merupakan bagian penting dari demokrasi digital (Gray et al., 2023). Namun, studi-studi terdahulu mengenai partisipasi digital warga melalui media sosial masih didominasi oleh fokus pada keterlibatan simbolik atau ekspresif semata. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berkorelasi positif dengan keterlibatan sipil, namun hanya sebagai bentuk ekspresi individual (Skoric et al., 2016).

Selain itu, penelitian tentang framing digital umumnya berpusat pada media arus utama atau aktor elit politik dan belum mengkaji bagaimana warga biasa menggunakan media sosial untuk membangun kontra-narasi kebijakan negara (Hodzi & Zihnioğlu, 2023). Di sisi lain, literatur mengenai partisipasi digital juga cenderung menggambarkan warga sebagai peserta pasif hanya sebagai penerima informasi yang mencerminkan tren “partisipasi retorik” yang minim deliberasi (digital deliberation) serta tidak memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan ide atau usulan kebijakan (citizen providing ideas) (Santini & Carvalho, 2019). Meski demikian, melalui tagar #IndonesiaGelap, dapat dilihat bahwa masyarakat tidak hanya terlibat secara simbolik atau ekspresif semata, tetapi juga membingkai ulang situasi sosial dan politik. Pembingkai ini menjadi bentuk perlawanan simbolik terhadap ketimpangan kebijakan serta upaya untuk menarik perhatian pemerintah (Dubrow, 2015). Praktik ini dapat dipahami sebagai bagian dari issue framing, yang mana warga menggunakan tagar #IndonesiaGelap untuk membangun kesadaran publik terhadap isu yang sedang mencuat. Menurut Simon et al. (2017), issue framing adalah praktik yang memungkinkan masyarakat mengangkat isu penting ke ruang wacana dan memengaruhi arah diskusi publik.

Lebih jauh lagi interaksi antar pengguna X, seperti melalui thread, reply, dan quote, mencerminkan proses digital deliberation, yakni diskusi dan pertukaran pendapat antar warga untuk mencapai pemahaman bersama atau kesepakatan terkait isu kebijakan publik (Simon et al., 2017). Proses ini dapat terjadi karena X memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pandangan, argumen, dan kritik (Sanford, 2017). Meskipun diskusi di media sosial seperti X tidak selalu berlangsung secara rasional dan setara, platform ini tetap berperan sebagai ruang wacana publik yang memungkinkan masyarakat membahas isu-isu kebijakan yang lebih luas di luar kendali negara (Abdulla, 2023). Namun, dalam kasus ini, partisipasi masyarakat tidak terbatas pada penyampaian argumen dan kritik semata, tetapi juga mencakup usulan kebijakan dan tuntutan yang konkret. Melalui aliansi BEM SI, masyarakat

menyuarakan 13 tuntutan utama (Tempo, 2025). Hal ini mencerminkan peran aktif masyarakat sebagai pembentuk wacana dan perumus solusi, selaras dengan konsep citizen providing ideas, yang mana masyarakat diberi ruang untuk berkontribusi dalam membentuk gagasan, usulan kebijakan atau solusi melalui partisipasi demokratis berbasis digital (Simon et al., 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana masyarakat menggunakan tagar #IndonesiaGelap di platform X sebagai bentuk partisipasi digital dalam membingkai isu kebijakan publik (issue framing), serta bagaimana praktik ini mencerminkan proses digital deliberation dan citizen providing ideas. Secara khusus, penelitian ini ingin mengungkap bagaimana warga tidak hanya terlibat dalam ekspresi simbolik, tetapi juga membangun narasi tandingan, pertukaran pendapat, dan menyampaikan tuntutan konkret terhadap negara melalui ruang digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami bagaimana masyarakat menggunakan media sosial khususnya platform X sebagai ruang partisipasi dalam merespons kebijakan publik. Dua strategi analisis utama yang digunakan adalah *Critical Discourse Analysis* (CDA) dan *Qualitative Content Analysis* (QCA). CDA, sebagaimana dikembangkan oleh Norman Fairclough (1995), menekankan hubungan antara teks, praktik diskursif, dan praktik sosial, serta bagaimana bahasa digunakan untuk memproduksi atau melawan struktur kekuasaan. Sementara itu, QCA merupakan metode yang sistematis dan fleksibel untuk mengkategorikan isi data kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Mayring (2014) dan Schreier (2012), yang menekankan pentingnya interpretasi kontekstual dan keterbukaan dalam pengkodean data.

Karena fokus penelitian ini pada partisipasi digital warga, data dikumpulkan dari platform media sosial X, yang menjadi ruang digital utama bagi masyarakat dalam mengekspresikan opini dan berpartisipasi secara real-time dalam isu kebijakan publik. Data dikumpulkan melalui teknik purposive sampling terhadap 30 tweet, thread, reply, dan quote yang menggunakan tagar #IndonesiaGelap serta memiliki engagement tinggi selama periode 17 Februari 2025 hingga 31 Juli 2025. Jenis data mencakup unggahan publik yang merepresentasikan opini, kritik, dukungan, sarkasme, maupun ajakan mobilisasi.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan CDA dan QCA. CDA digunakan untuk mengkaji bagaimana wacana dalam unggahan bertagar #IndonesiaGelap dibentuk melalui bahasa dan gaya penyampaian, seperti metafora, emosi, dan dikotomi (misalnya rakyat vs pemerintah) yang mencerminkan relasi kekuasaan antar aktor sosial. Analisis dilakukan pada tiga dimensi menurut Fairclough (1995): isi teks, proses produksi dan distribusi, serta konteks sosial. Pendekatan ini mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk issue framing dalam perdebatan kebijakan publik. Adapun QCA digunakan untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi warga melalui proses pengkodean data, dengan kategori yang dikembangkan dari temuan empiris dan kerangka teori. Melalui pendekatan ini, partisipasi digital warga dapat dipetakan secara sistematis, baik dalam bentuk diskusi dan pertukaran pendapat (digital deliberation), maupun penyampaian ide atau tuntutan kebijakan (citizen providing ideas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Issue Framing dalam Tagar #IndonesiaGelap

Tagar #IndonesiaGelap menjadi simbol warga dalam menangani krisis sosial-politik yang muncul akibat kebijakan kontroversial pemerintah pada awal tahun 2025. Dalam konteks ini, warga tidak sekedar menyampaikan ekspresi spontan, melainkan juga membangun narasi kolektif yang merefleksikan relasi kuasa antara negara dan masyarakat sipil. Proses ini merupakan bagian dari praktik issue framing, yakni bagaimana suatu isu dimaknai dan dipresentasikan melalui bahasa untuk memengaruhi pemahaman publik (Simon et al., 2017).

Untuk melihat praktik issue framing dapat dengan melakukan analisis menggunakan pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA) sebagaimana dikembangkan oleh Fairclough (1995), dengan melihat tiga dimensi wacana yakni, isi teks, bagaimana teks diproduksi dan disebarkan, serta konteks sosial yang melatarbelakangi. Hasil analisis terhadap 5 tweet yang paling representatif menunjukkan bahwa framing yang dilakukan mencakup oposisi simbolik antara rakyat dan elit, ekspresi afektif yang membangkitkan solidaritas kolektif, kewaspadaan terhadap pengendalian narasi oleh negara, serta kritik satir yang memperkuat delegitimasi terhadap institusi dan kebijakan pemerintah.

Secara tekstual, terdapat tweet menggunakan diksi evaluatif dan metafora emosional yang menggambarkan situasi. Misalnya pada tweet berikut : “Tenda kita dibongkar & dibetot. Ada kemungkinan tenda kita mengalami kerusakan. Aksi kita ini aksi damai. Tenda kita yg dipindahkan secara paksa oleh Pamdal DPR RI ke atas trotoar. Mau pakai cara apa lagi agar warga berdaulat di atas elit? #IndonesiaGelap #TolakUUTNI #SupremasiSipil” (Sumber: X @barengwarga).

Pada tweet tersebut membentuk oposisi simbolik antara “warga” dan “elit”, yang merepresentasikan pergeseran perlawanan dari aksi fisik ke simbolik. Diksi seperti “dibetot” dan “paksa” menandakan kekerasan simbolik yang disebarluaskan melalui tweet dan repost. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial dimanfaatkan untuk menantang struktur kekuasaan melalui narasi tandingan. Sebagaimana dijelaskan oleh Fife, Flinn, dan Nyhan (2023), ruang digital memungkinkan masyarakat sipil mendefinisikan ulang realitas sosial dan melawan dominasi wacana negara.

Pola framing simbolik ini tidak hanya dibangun melalui diksi kekerasan, tetapi juga melalui bahasa emosional dan moral yang membangkitkan solidaritas kolektif. Salah satu contohnya muncul dalam tweet berikut: “INDONESIA GELAP 🐼 Seperti kata Prof Mahfud, waktunya berkumpul dan menjadi lilin lilin kecil gaes, kita bersatu agar bisa menjadi obor penerangan yang besar. Satu kata, LAWAN! 🔥 #IndonesiaGelap” (Sumber: X @KakekHalal)

Metafora “menjadi lilin-lilin kecil” dalam kegelapan membingkai warga sebagai agen moral dan penopang demokrasi di tengah krisis negara. Hal ini merepresentasikan apa yang disebut oleh Papacharissi (2015) sebagai affective framing, yakni penggunaan ekspresi emosional dan simbolik untuk membangun solidaritas dan identitas kolektif dalam ruang digital.

Di sisi lain, framing juga hadir dalam bentuk kritik terhadap strategi komunikasi negara seperti dalam tweet berikut: “Jangan terkecoh sama pengalihan isu ya. Kawal dan tetap

ramaikan! #GagalkanRUUTNI #CabutRUUTNI #TolakRUUTNI #TolakRevisiUUTNI #IndonesiaGelap #TolakDwifungsiABRI #SupremasiSipil” (Sumber: X @logos_id)”).

Pada tweet tersebut mencerminkan kewaspadaan warga terhadap kontrol narasi negara. Dalam praktik diskursif, tweet-tweet ini tersebar luas di antara aktivis dan media alternatif, menunjukkan bahwa wacana yang dibangun memiliki daya reproduksi sosial yang tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan Hoffmann et al. (2024), bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang ekspresi melainkan juga berfungsi sebagai sebuah ruang untuk masyarakat sipil, media, dan aktor politik terlibat dalam kontestasi narasi politik.

Terakhir, beberapa tweet menampilkan kritik langsung terhadap sistem hukum dan pemerintahan melalui gaya satir dan tajam sebagai berikut: “Perampasan Aset Koruptor gak disahkan Pasal Penghinaan Presiden dia gaskan, Dewan Pengkhianat Rakyat #IndonesiaGelap” (Sumber: X @KaredRV). “Di saat anak-anak presiden berpesta Anak-anak rakyat dipukuli aparat #PeringatanDarurat #IndonesiaGelap” (Sumber: X @MurtadhaOne1)”).

Keduanya menunjukkan penggunaan ironi sebagai strategi diskursif yang memperkuat delegitimasi pemerintah di ruang publik. Strategi semacam ini sejalan dengan temuan Cammaerts (2015), yang menjelaskan bahwa ironi dan sarkasme dalam ruang digital berfungsi sebagai bentuk subversive voice yang dapat mengganggu hegemoni narasi resmi serta memperluas ruang kritik politik oleh warga. Melalui hal ini, ketimpangan kebijakan dan ketidakadilan sosial ditampilkan secara kontras, sehingga memperkuat perasaan ketidakpuasan dan dorongan masyarakat untuk menolak kebijakan pemerintah

Temuan dari tweet-tweet di atas dapat diringkas dalam tabel berikut, yang menunjukkan pola-pola framing utama serta karakteristik wacana yang muncul dalam tagar #IndonesiaGelap:

Tabel 1. Ciri Linguistik

<i>Pola Framing</i>	<i>Contoh Ciri Linguistik</i>	<i>Fungsi Diskursif</i>
Oposisi Simbolik	Penggunaan diksi “warga vs elit”, “dibetot”, “paksa”, “pengkhianat rakyat”	Membentuk pertikaian antara masyarakat dan negara, membingkai relasi kuasa secara simbolik
Ekspresi Afektif	Metafora seperti “lilin-lilin kecil”, emotikon 🥺🔥, diksi moral seperti “berdaulat”, “lawan”	Membentuk solidaritas emosional, membangun identitas kolektif sebagai agen demokrasi
Kewaspadaan Naratif	Frasa seperti “jangan terkecoh”, “pengalihan isu”, ajakan “kawal dan ramaikan”	Mendorong kesadaran kritis terhadap strategi komunikasi negara, memperkuat kontrol warga atas isu
Kritik Satir	Sarkasme seperti “Dewan Pengkhianat Rakyat”, “anak presiden berpesta, rakyat dipukuli aparat”	Delegitimasi institusi serta menguatkan perlawanan warga dengan cara menyindir lewat ironi

Selain itu, analisis ini juga sejalan dengan tiga dimensi wacana menurut Fairclough (1995). Pada dimensi tekstual, wacana #IndonesiaGelap memperlihatkan penggunaan diksi evaluatif, metafora emosional, serta ironi sebagai strategi linguistik untuk membingkai realitas dan membangun oposisi terhadap narasi dominan negara. Pada dimensi praktik diskursif, tweet

yang dianalisis disebarkan secara luas melalui fitur repost, quote, serta interaksi digital lainnya yang memungkinkan reproduksi makna secara masif dan cepat, terutama di kalangan aktivis dan media alternatif. Sementara itu, pada dimensi konteks sosial, munculnya tagar ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi krisis sosial-politik akibat kebijakan negara yang kontroversial. Dalam konteks tersebut, media sosial menjadi ruang alternatif bagi masyarakat sipil untuk merespons, merumuskan ulang, dan membentuk kembali pemahaman atas kebijakan publik, sekaligus memperlihatkan relasi kuasa antara negara dan warga dalam ranah diskursif. Ketiga dimensi wacana tersebut dapat dianalisis lebih lanjut melalui tabel di bawah ini, yang memuat contoh tweet beserta penjelasan berdasarkan dimensi teks, praktik diskursif, dan konteks sosialnya.

Tabel 2. Contoh Tweet

Contoh Tweet	Dimensi Teks (Isi & Struktur Bahasa)	Dimensi Praktik Diskursif (Produksi & Distribusi)	Dimensi Konteks Sosial (Situasi & Relasi Kuasa)
“Tenda kita dibongkar & dibetot. Ada kemungkinan tenda kita mengalami kerusakan. Aksi kita ini aksi damai. Tenda kita yg dipindahkan secara paksa oleh Pamdal DPR RI ke atas trotoar. Mau pakai cara apa lagi agar warga berdaulat di atas elit? #IndonesiaGelap #TolakUUTNI #SupremasiSipil”	Diksi kekerasan simbolik: "dibetot", "paksa"; oposisi simbolik “warga vs elit”	Disebar melalui <i>tweet</i> dan <i>repost</i> oleh aktivis, digunakan untuk memperluas jangkauan narasi	Merefleksikan relasi kuasa tidak setara antara warga dan negara, menentang dominasi lembaga negara
“INDONESIA GELAP 🌑 Seperti kata Prof Mahfud, waktunya berkumpul dan menjadi lilin lilin kecil gaes, kita bersatu agar bisa menjadi obor penerangan yang besar. Satu kata, LAWAN! 🔥 #IndonesiaGelap”	Metafora emosional dan moral: "lilin-lilin kecil", diksi kolektif "bersatu", "LAWAN!"	Menggunakan simbol emosi untuk memicu solidaritas dan identitas kolektif	Membangun <i>affective framing</i> dalam krisis sosial-politik, menampilkan warga sebagai pihak tertindas yang bersatu untuk melawan
“Jangan terkecoh sama pengalihan isu ya. Kawal dan tetap ramaikan! #GagalkanRUUTNI #CabutRUUTNI #TolakRUUTNI #TolakRevisiUUTNI #IndonesiaGelap #TolakDwifungsiABRI #SupremasiSipil”	Diksi kewaspadaan dan perlawanan naratif: “pengalihan isu”, “kawal”	Disebarkan oleh komunitas aktivis dan media alternatif untuk membentuk wacana tandingan	Menunjukkan kewaspadaan terhadap propaganda negara, refleksi ketidakpercayaan terhadap komunikasi resmi
“Perampasan Aset Koruptor gak disahkan Pasal Penghinaan Presiden dia gaskan, Dewan Pengkhianat Rakyat #IndonesiaGelap”	Penggunaan ironi dan metafora tajam: “Dewan Pengkhianat Rakyat”	Disebarkan dalam bentuk satir, digunakan untuk mempermalukan lembaga negara	Strategi <i>subversive voice</i> dalam ruang digital untuk melawan hegemoni narasi negara
“Di saat anak-anak presiden berpesta Anak-anak rakyat	Kontras antara elit dan rakyat,	<i>Repost</i> tinggi serta beredar luas saat isu	Menampilkan ketidakadilan sosial

dipukuli #PeringatanDarurat #IndonesiaGelap”	aparap	diksi emosional: “dipukuli aparap”	menjadi sorotan utama, digunakan untuk memperkuat narasi ketimpangan	secara eksplisit, memperkuat ketidakpercayaan publik
--	--------	--	---	--

Melalui penjelasan di atas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, praktik issue framing dalam kampanye digital #IndonesiaGelap memperlihatkan dinamika diskursif yang kompleks, di mana warga secara aktif memproduksi, menyebarkan, dan mengkonsolidasikan makna sosial-politik melalui platform media sosial X. Framing ini tidak sekadar reaksi terhadap tindakan negara, melainkan bagian dari persaingan wacana kekuasaan yang menunjukkan relasi kuasa antara negara dan masyarakat sipil.

Melalui oposisi simbolik, ekspresi afektif, kewaspadaan naratif, serta kritik satir, warga memanfaatkan ruang digital sebagai ruang perjuangan makna. Ini memperkuat pemahaman bahwa media sosial bukan hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai ruang artikulasi politik dan demokratisasi wacana (Bennett & Segerberg, 2013). Dengan demikian, tagar #IndonesiaGelap merefleksikan upaya kolektif warga untuk menentang kuasa negara dan memperjuangkan narasi tandingan atas realitas sosial-politik di ranah digital.

Digital Deliberation dalam Tagar #IndonesiaGelap

Berpindah dari pembahasan issue framing pada sub bab sebelumnya, bagian ini menelaah bagaimana percakapan publik di X dapat mencerminkan proses digital deliberation dengan menggunakan tagar #IndonesiaGelap. Menurut Simon et al. (2017), deliberasi dalam ruang digital ditandai dengan interaksi yang melibatkan pertukaran argumen, penyampaian informasi, dan diskusi ide bersama-sama. Hal ini bertujuan untuk membentuk pemahaman bersama atau mencari solusi kolektif. Dalam konteks kebijakan publik, digital deliberation bukan sekedar opini spontan, tetapi juga mengandung unsur argumentatif dan partisipatif yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan. Untuk menganalisis bentuk-bentuk deliberasi dalam percakapan publik, penelitian ini menggunakan *Qualitative Content Analysis* (QCA), yaitu metode yang memungkinkan peneliti mengkategorikan data secara sistematis berdasarkan tema atau bentuk interaksi (Mayring, 2014).

Kategori yang digunakan diadaptasi dari tipologi interaksi deliberatif online yang dikemukakan oleh Stromer-Galley (2007) yang awalnya memuat enam elemen antara lain, *opinion expression*, *sourcing*, *disagreement*, *equality*, *topic*, dan *engagement*. Dalam penelitian ini, elemen-elemen tersebut disederhanakan menjadi empat kategori inti yakni, O (Opini), yaitu ungkapan pandangan, sikap atau evaluasi pribadi terhadap isu; D (Data/Fakta), yaitu penyampaian informasi faktual atau rujukan sumber berita; A (Ajakan), yaitu seruan untuk berdiskusi, berkolaborasi, atau melakukan aksi kolektif, lalu yang terakhir C (Counter-argument), yaitu sanggahan terhadap pihak lain. Penyederhanaan ini bertujuan untuk memfokuskan analisis pada bentuk-bentuk interaksi yang paling terlihat dalam percakapan publik, sehingga memudahkan proses pengkodean.

Berdasarkan kategori tersebut, setiap tweet yang memuat tagar #IndonesiaGelap kemudian dikodekan sesuai bentuk deliberasi yang muncul. Proses pengkodean dilakukan secara manual dengan membaca dan menafsirkan konten setiap tweet untuk menentukan

kategori yang paling sesuai atau kombinasi kategori jika dalam satu tweet terdapat lebih dari satu bentuk interaksi. Hasil pengkodean ini kemudian dirangkum untuk melihat seberapa sering setiap kategori muncul, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Kutipan Tweet

No.	Kutipan Tweet	Kode	Penjelasan Pengkodean
1.	“Tenda kita dibongkar & dibetot... Mau pakai cara apa lagi agar warga berdaulat di atas elit?”	O	Opini tentang ketidakadilan dan perlakuan aparat.
2.	“AYOO BACA YANG BELUM TAU... LAWAN SAMPAI MENANG!”	A	Ajakan membaca informasi dan melawan.
3.	“Jangan mau dibungkam, kita bungkam balik dengan fakta!!”	C	<i>Counter-argument</i> terhadap upaya pembungkaman.
4.	“Bagaimanapun Lebih Enak Jaman Pak SBY...”	O	Opini nostalgia dan preferensi politik.
5.	“JANGAN PERNAH TAKUT BERSUARA... SEMANGAT TERUS”	A	Ajakan untuk terus bersuara dan berjuang.
6.	“Ini sangat mengerikan. Upaya #IndonesiaGelap bungkam pers ... https://remotivi.or.id/aktivitas/proyek/lampau-25 ”	D	Informasi faktual dengan sumber tautan.
7.	“Jangan terkecoh sama pengalihan isu ya. Kawal dan tetap ramaikan!”	A	Ajakan untuk tetap waspada dan aktif.
8.	“untuk teman-teman yg turun aksi, jangan lupa saling jaga...”	A	Ajakan menjaga solidaritas di aksi.
9.	“Waspada pengembosan aksi #IndonesiaGelap”	A	Ajakan waspada terhadap upaya pelemahan gerakan.
10.	“Perampasan Aset Koruptor gak disahkan... Dewan Pengkhianat Rakyat”	O	Opini mengecam DPR.
11.	“Di saat anak-anak presiden berpesta...”	O	Opini kritis terhadap kesenjangan sosial.
12.	“LG Batal Investasi Rp 130 Triliun. Pabrik Baterai Mobil Tidak Jadi Dibangun Berita mengejutkan ini merupakan pukulan telak untuk Indonesia yang sedang mengalami masalah terkait gelombang PHK”	D	Informasi faktual mengenai batalnya investasi.
13.	“ada konten mahasiswa aksi #IndonesiaGelap salfo sama polwan...”	D	Fakta/dugaan tentang rekayasa konten aksi.
14.	“#indonesiaGelap adlh akumulasi kemarahan dr rakyat...”	O	Opini tentang akumulasi kemarahan rakyat.
15.	“#IndonesiaGelap terlalu banyak hal ngga adil...”	O	Opini kritis terhadap ketidakadilan.
16.	“#IndonesiaGelap adalah gerakan kolektif tanpa tokoh	O	Opini yang menjelaskan

	sentral...”		makna gerakan.
17.	“Ini pernyataan lucu... Koruptor biaya musuhnya?”	C	Sanggahan terhadap narasi pembiayaan demo.
18.	“INDONESIA GELAP 🐼... LAWAN! 🔥 ”	A	Ajakan untuk bersatu dan melawan.
19.	“HARUS MENANG, HARUS SELAMAT!!... tetap waspada”	A	Ajakan menjaga keselamatan dan kewaspadaan.
20.	“MARAH BGT NGELIAT POLISI...”	O	Opini keras terhadap perilaku polisi.

Dari hasil pengkodean ini, dapat dilihat pola dominasi dan variasi bentuk deliberasi yang terjadi dalam percakapan pada sosial media X dengan tagar #IndonesiaGelap. Tabel berikut menyajikan distribusi frekuensi kemunculan masing-masing kategori yang akan menjadi dasar analisis untuk memahami bagaimana warga berdiskusi dan berinteraksi di ruang digital.

Tabel 3. Tweet

Kode	Kategori	Jumlah Tweet	Persentase
O	Opini	8	40%
D	Data/Fakta	3	15%
A	Ajakan	7	35%
C	<i>Counter-argument</i>	2	10%
Total	-	20	100%

Analisis menggunakan QCA pada 20 tweet dengan tagar #IndonesiaGelap menunjukkan bahwa bentuk digital deliberation dalam percakapan publik didominasi oleh ungkapan opini (40%) dan ajakan (35%). Opini yang muncul berupa ekspresi kekecewaan, penilaian kritis terhadap kebijakan pemerintah, serta narasi ketidakadilan sosial. Contohnya terlihat pada tweet yang menyoroti perampasan aset koruptor dan kekerasan aparat terhadap rakyat.

“Perampasan Aset Koruptor gak disahkan Pasal Penghinaan Presiden dia gaskan, Dewan Pengkhianat Rakyat #IndonesiaGelap” (Sumber: X @KaredRV)

“Di saat anak-anak presiden berpesta Anak-anak rakyat dipukuli aparat #PeringatanDarurat #IndonesiaGelap” (Sumber: X @MurtadhaOne1)

Melalui tweet tersebut dapat dilihat bahwa media sosial khususnya X memudahkan individu untuk menyampaikan opini pribadi secara luas. Ekspresi politik dapat disalurkan melalui unggahan pribadi seperti tweet yang tidak hanya memperkuat identitas politik, tetapi juga membuka ruang keterlibatan warga tanpa perantara institusi formal dalam mengemukakan opini (Momeni, 2017).

Sementara itu, ajakan berperan penting sebagai seruan kolektif untuk berdiskusi, berpartisipasi dalam aksi dan mempertahankan kewaspadaan terhadap narasi resmi. Hal ini

dapat dilihat melalui tweet - tweet berikut: “AYOO BACA YANG BELUM TAU KENAPA KITA HARUS MENOLAK RUU TNI & RUU POLRI!! LAWAN SAMPAI MENANG ! 🔥 #CabutUUTNI #TolakRUUPolri #IndonesiaGelap” (Sumber: X @happywithV2) “HARUS MENANG, HARUS SELAMAT!! Stay safe utk yg turun aksi hari ini, jangan terpengaruh provokasi, awas lawan ada di kanan kiri, tetep waspada. #CabutUUTNI #TolakRUUPolri #IndonesiaGelap” (Sumber: X @txtdrjkt).

Ajakan-ajakan semacam ini, baik berupa seruan aksi, petisi, maupun kampanye, sangat menonjol di X. Platform ini mempercepat penyebaran informasi sekaligus memudahkan koordinasi aksi kolektif termasuk protes dan kampanye politik, sehingga menjadi ruang strategi bagi mobilisasi gerakan sosial secara daring (Jost et al., 2018). Kemudian, data dan fakta (15%) turut muncul sebagai penyampaian informasi konkret, seperti pembatasan investasi besar dan kritik terhadap kontrol media yang dapat dilihat melalui tweet-tweet berikut.

“LG Batal Investasi Rp 130 Triliun. Pabrik Baterai Mobil Tidak Jadi Dibangun Berita mengejutkan ini merupakan pukulan telak untuk Indonesia yang sedang mengalami masalah terkait gelombang PHK #IndonesiaGelap” (Sumber: X @Kebenaran_70)

“Ini sangat mengerikan. Upaya #IndonesiaGelap bungkam pers: - investigasi o/ media penyiaran - penayangan investigasi di media audiovisual - perluasan kewenangan lembaga penyiaran kontrol isi jurnalistik, ga lagi Dewan Pers [@barengwarga](https://remotivi.or.id/aktivitas/proyek/lampau-25) @BudiBukanIntel” (Sumber: X @srpablo)

Penyajian informasi berbasis data ini tidak hanya menambah bobot argumen, tetapi juga memberikan legitimasi pada kritik yang disampaikan. Dengan menghadirkan bukti konkret, pengguna media sosial dapat menguatkan posisi mereka dalam diskursus digital ini (Irwanto et al., 2025). Peran data dan fakta ini menjadikan percakapan digital lebih dari sekedar ekspresi emosional, melainkan juga ruang diskusi yang berlandaskan data dan fakta. Sementara itu, kemunculan counter-argument (10%) menunjukkan adanya upaya untuk menentang atau menyanggah, penolakan terhadap pembungkaman, dan seruan untuk mempertahankan ruang demokrasi. Sebagai contoh terlihat dari tweet penolakan terhadap pembungkaman. “Jangan mau dibungkam, kita bungkam balik dengan fakta !! #TolakRUUTNI #TolakDwifungsiTNI #CabutRUUTNI #IndonesiaGelap #PeringatanDarurat #ArtistBersuara” (Sumber: X @moakkun)

Melalui tweet ini, terlihat bahwa media sosial menjadi ruang untuk menanggapi dan menyanggah narasi dominan dengan membangun narasi tandingan. Proses ini menciptakan ruang diskusi alternatif, di mana warga dapat mengemukakan perspektif berbeda (McKenzie-Mohr & Lafrance, 2017). Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, tetapi juga ruang untuk pertukaran gagasan yang mendorong lahirnya diskusi kritis dalam demokrasi digital.

Dominasi opini dan ajakan ini mengindikasikan bahwa percakapan publik dalam X dengan menggunakan tagar #IndonesiaGelap berfokus pada konstruksi narasi kolektif yang mengekspresikan ketidakpuasan sekaligus mendorong partisipasi aktif warga. Temuan ini sejalan dengan hasil analisis issue framing dengan menggunakan CDA yang menunjukkan adanya konstruksi oposisi simbolik antara warga dan elit serta pembentukan solidaritas sosial.

Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga ruang digital deliberation di mana narasi tandingan dibangun melalui ungkapan opini dan ajakan untuk memperkuat praktik demokrasi digital.

Citizens Providing Ideas dalam Tagar #IndonesiaGelap

Citizen providing ideas merupakan tahapan yang penting, yaitu ketika warga menyumbangkan ide dan solusi terhadap persoalan kebijakan (Simon et al., 2017). Citizen providing ideas mengandalkan pengetahuan kontekstual serta pengalaman langsung warga yang sering kali tidak dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Dalam konteks penggunaan #IndonesiaGelap, partisipasi warga berkembang melampaui simbol perlawanan. Gerakan ini membuka ruang bagi kontribusi warga untuk menyusun gagasan kebijakan alternatif secara bersama-sama. Salah satu contoh konkret adalah lahirnya 13 tuntutan yang disebarluaskan melalui X.

13 Tuntutan #IndonesiaGelap



Sumber: X @asumsico

Berbeda dengan sub bab sebelumnya yang mana analisis difokuskan untuk menilai kualitas deliberasi menggunakan indikator-indikator normatif, seperti opini, ajakan, dan lain-lain, pada sub bab ini lebih berfokus untuk memetakan bentuk kontribusi warga dalam menyampaikan ide dan gagasan kebijakan. Meskipun keduanya menggunakan Qualitative Content Analysis (QCA), kerangka kategorinya berbeda. Analisis pada digital deliberation menilai sejauh mana percakapan memenuhi prinsip-prinsip deliberasi, sedangkan analisis pada citizen providing ideas mengidentifikasi konten ide yang disampaikan warga, baik dalam bentuk kritik kebijakan, usulan solusi, penjelasan tuntutan, maupun dukungan terhadap gerakan tanpa menilai kualitas deliberatifnya. Perbedaan fokus yang ada membuat hasil pada sub bab ini bersifat melengkapi serta memberikan gambaran mengenai substansi ide warga yang dapat dibandingkan dengan kualitas deliberasi pada sub bab sebelumnya.

Berbeda dengan sub bab digital deliberation yang menganalisis 20 tweet, pada sub bab ini jumlah data diperluas menjadi 30 tweet. Penambahan ini dilakukan untuk memperkaya analisis dan memastikan seluruh ide yang relevan teridentifikasi dalam kategori. Dengan demikian, hasil pada bagian ini bersifat melengkapi serta memberikan gambaran mengenai

substansi ide warga yang dapat dibandingkan dengan temuan kualitas deliberasi pada sub bab sebelumnya.

Untuk melihat bagaimana ide-ide warga tersebut hadir dalam percakapan publik di X, analisis ini mengkategorikan 30 tweet dengan menggunakan #IndonesiaGelap yang mengandung gagasan kebijakan ke dalam enam kategori utama yakni Kritik Kebijakan (K), Usulan Solusi (U), Penjelasan Tuntutan (P), Seruak Aksi (S), Narasi Personal/Emosional (N), dan Data/Fakta Pendukung (D). Enam kategori kontribusi warga tersebut dirumuskan melalui kombinasi pendekatan deduktif dan induktif. Secara deduktif, kategori seperti Kritik Kebijakan (K) dan Usulan Solusi (U) merujuk pada literatur partisipasi warga yang menekankan kontribusi aktif warga dalam ruang publik (Arnstein, 1969; Fung, 2006). Selanjutnya, kategori Penjelasan Tuntutan (P) dan Seruan Aksi (S) dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi politik warga yang berfungsi untuk memperkuat klaim dan mendorong aksi kolektif, sejalan dengan variasi mode komunikasi dalam partisipasi publik (Fung, 2006). Sementara itu, kategori Narasi Personal/Emosional (N) dan Data/Fakta Pendukung (D) muncul secara induktif dari hasil open coding tweet, yang menunjukkan bagaimana warga tidak hanya menyampaikan kritik atau usulan, tetapi juga mengaitkan pengalaman personal maupun bukti empiris untuk memperkuat argumen mereka.

Tabel 4. Penjelasan kodean

No.	Kutipan <i>Tweet</i>	Kode	Penjelasan Pengkodean
1.	"Tenda kita dibongkar & dibetot... aksi damai... dipindahkan paksa oleh Pamdal DPR RI..."	K	Mengkritik tindakan aparat memindahkan tenda aksi damai secara paksa, menunjukkan ketimpangan antara warga dan elit
2.	AYOO BACA YANG BELUM TAU KENAPA KITA HARUS MENOLAK RUU TNI & RUU POLRI!! LAWAN SAMPAI MENANG ! 🔥 "	P	Mengajak publik memahami alasan penolakan RUU TNI dan Polri, sekaligus menyerukan aksi perlawanan.
3.	"Jangan mau dibungkam, kita bungkam balik dengan fakta !!"	S	Memotivasi audiens untuk melawan pembungkaman dengan menyebarkan fakta.
4.	"Bagaimanapun Lebih Enak Jaman Pak SBY... Semoga Mas AHY Pengganti Wapres 2024 - 2029."	N	Menggunakan nostalgia politik untuk mengkritik kondisi ekonomi sekarang dan mendukung figur tertentu.
5.	"JANGAN PERNAH TAKUT BERSUARA... SEMANGAT TERUS BUAT SEMUA YANG SEDANG BERJUANG!!!!"	S	Mendorong keberanian dan semangat peserta aksi.
6.	"Ini sangat mengerikan. Upaya #IndonesiaGelap bungkam pers..."	D	Memberikan fakta terkait ancaman terhadap kebebasan pers melalui regulasi.
7.	"Jangan terkecoh sama pengalihan isu ya. Kawal dan tetap ramaikan!"	S	Mengajak publik tetap fokus pada isu utama dan terus memantau perkembangan.

8.	"Untuk teman-teman yg turun aksi, jangan lupa saling jaga... 'All Cats Are Berserikat'"	N	Memberikan pesan solidaritas dan dukungan moral bagi peserta aksi.
9.	"Waspada penggemboan aksi #IndonesiaGelap"	K	Mewanti-wanti tentang potensi pelemahan gerakan dari pihak tertentu.
10.	"Perampasan Aset Koruptor gak disahkan... Pasal Penghinaan Presiden dia gaskan..."	K	Mengkritik prioritas legislasi yang dianggap tidak pro-rakyat.
11.	"Di saat anak-anak presiden berpesta... anak-anak rakyat dipukuli aparat"	N	Menggunakan kontras sosial untuk menggambarkan ketidakadilan.
12.	"LG Batal Investasi Rp 130 Triliun..."	D	Memberikan informasi faktual tentang dampak ekonomi akibat kebijakan.
13.	"Ada konten mahasiswa aksi salfok sama polwan... diduga bikin polisi..."	K	Mengkritik strategi aparat dalam mengalihkan perhatian dari isu utama.
14.	"#IndonesiaGelap adalah akumulasi kemarahan dr rakyat..."	K	Menggambarkan ketidakpuasan kolektif terhadap kebijakan pemerintah
15.	"Terlalu banyak hal ngga adil... sulit cari kerja... sulit cari gas..."	N	Menceritakan kesulitan hidup rakyat untuk mengkritik kondisi sosial ekonomi.
16.	"#IndonesiaGelap adalah gerakan kolektif... rapor merah untuk kalian..."	U	Mengajak pemerintah menghentikan kebijakan populis dan melibatkan publik dalam proses kebijakan.
17.	"Mana ada koruptor mau membiayai demo..."	K	Membantah narasi negatif terhadap gerakan dan mengkritik korupsi rezim.
18.	"Seperti kata Prof Mahfud, waktunya berkumpul dan menjadi lilin kecil..."	N	Menggunakan metafora lilin sebagai simbol perlawanan kolektif.
19.	"HARUS MENANG, HARUS SELAMAT!! Stay safe utk yg turun aksi..."	S	Mengajak peserta aksi tetap waspada dan tidak terprovokasi.
20.	"MARAH BGT NGELIAT POLISI... 99% kelakuan lo sama semua!!"	K	Mengkritik perilaku aparat yang dianggap melanggar hukum secara sistemik.
21.	"Rangkuman 13 tuntutan di #IndonesiaGelap..."	P	Menyajikan daftar ringkas tuntutan yang diajukan dalam aksi.

22.	"Hari ini, di aksi #IndonesiaGelap warga turun ke jalan..."	K	Menggambarkan latar belakang aksi sebagai respons atas kebijakan yang merugikan rakyat.
23.	"Salah satu tuntutan adalah Reformasi Polri..."	U	Mengusulkan reformasi Polri sebagai langkah perbaikan tata kelola keamanan.
24.	"Dwifungsi ABRI: mau dibangkitkan?"	P	Memberikan latar belakang tuntutan penghapusan dwifungsi ABRI.
25.	"Mahasiswa ndasmu... efisiensi kok nambah menteri..."	K	Mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan prinsip efisiensi.
26.	"13 Point Tuntutan Mahasiswa pada demo..."	P	Memaparkan tuntutan aksi secara rinci.
27.	"#IndonesiaGelap bukan hanya di Jawa dan Sumatera... pendidikan gratis..."	U	Mengusulkan peningkatan kualitas pendidikan di Papua.
28.	"Revisi UU Kejaksaan Harus ditolak!!"	K	Mengkritik revisi UU Kejaksaan yang dianggap memperbesar peluang penyalahgunaan kekuasaan.
29.	"Ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi..."	K	Menggambarkan skala aksi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
30.	"Asta Bencana: Memahami #IndonesiaGelap Melalui 8 Masalah..."	D	Memberikan ringkasan analisis YLBHI atas masalah krusial yang dihadapi negara.

Berdasarkan pengkodean terhadap 30 tweet bertagar #IndonesiaGelap, diperoleh enam kategori utama untuk menganalisis citizen providing ideas dengan persentase beragam. Berikut tabel yang memuat kode, kategori, jumlah tweet, dan persentase dari setiap kategori yang ada.

Tabel 5. Persentase

Kode	Kategori	Jumlah Tweet	Persentase
K	Kritik Kebijakan	18	60%
P	Penjelasan Tuntutan	6	20%
U	Usulan Solusi	3	10%
S	Seruan Aksi	6	20%
N	Narasi Personal/Emosional	5	16,7%
D	Data/Fakta Pendukung	6	20%

Total	-	30	100%
--------------	---	-----------	------

Berdasarkan hasil QCA terhadap 30 tweet bertagar #IndonesiaGelap, kategori kritik dan kebijakan mendominasi dengan persentase sebesar 60%. Dominasi ini menunjukkan bahwa percakapan publik di media sosial sebagian besar diarahkan untuk mengekspos kelemahan, ketidakadilan, dan dampak negatif kebijakan pemerintah. Kritik yang diutarakan tidak hanya berfokus pada isi kebijakan, tetapi juga menyasar legitimasi politik serta akuntabilitas para pembuat kebijakan. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Casero-Ripollés (2021) yang mengatakan bahwa percakapan di media sosial khususnya X dapat memengaruhi dan membentuk isu yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Kemudian, kategori penjelasan tuntutan dan data/fakta pendukung sama-sama memiliki persentase 20%. Penjelasan tuntutan berfungsi menjabarkan poin-poin perjuangan gerakan, memperluas pemahaman publik mengenai isu-isu krusial seperti reformasi keamanan, pendidikan, dan tata kelola negara. Sedangkan, data/fakta pendukung menjadi instrumen penting untuk memperkuat argumen, memberikan bukti konkret, dan membangun kredibilitas wacana yang diangkat. Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan Tufekci (2017) yang menegaskan bahwa kejelasan tuntutan dan penyediaan bukti merupakan strategi kunci dalam memperkuat kohesi dan memperluas dukungan publik.

Selanjutnya, pada kategori seruan aksi juga memiliki persentase 20%, hal ini menunjukkan bahwa gerakan yang ada aktif untuk memobilisasi dukungan dan mendorong partisipasi langsung. Sementara itu, narasi personal/emosional memiliki persentase 16,7% yang memperlihatkan bahwa pengalaman hidup dan sentuhan emosional menjadi strategi penting untuk menggali empati dan solidaritas publik. Temuan ini sejalan dengan studi Penney & Dadas (2014) yang menunjukkan bahwa kombinasi seruan aksi dan narasi personal dalam gerakan dalam media sosial mampu meningkatkan partisipasi dan rasa keterhubungan emosional di antara peserta aksi.

Lalu yang terakhir, kategori usulan solusi yang hanya sebesar 10%, namun keberadaanya menunjukkan bahwa partisipasi warga tidak berhenti pada kritik. Mereka juga mengusulkan alternatif kebijakan, dari perbaikan tata kelola hingga peningkatan partisipasi publik yang bermakna. Hal ini sejalan dengan temuan Aragón et al. (2017) yang menunjukkan bahwa media sosial semakin banyak digunakan untuk memberikan usulan kebijakan dan memungkinkan warga untuk mengajukan ide dan berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan.

Dengan demikian, hasil analisis ini menunjukkan bahwa gerakan #IndonesiaGelap di media sosial menjadi ruang partisipasi politik digital yang memfasilitasi citizen providing ideas. Warga tidak hanya menyampaikan kritik dan tuntutan, tetapi juga memformulasikan usulan kebijakan yang konkret, mulai dari reformasi keamanan hingga peningkatan kualitas pendidikan. Kehadiran data, narasi personal, dan seruan aksi memperkuat legitimasi ide yang diajukan, sekaligus mendorong partisipasi publik yang lebih luas. Hal ini menegaskan bahwa media sosial tidak hanya berperan sebagai ruang berekspresi, tetapi juga sebagai arena kolaboratif tempat warga turut serta dalam proses perumusan agenda kebijakan.

KESIMPULAN

Penelitian ini membantah pandangan bahwa partisipasi digital warga di media sosial hanya melibatkan aksi simbolik atau ekspresif semata. Temuan menunjukkan bahwa warga tidak sekedar mengekspresikan pendapat atau ikut serta dalam diskusi tanpa arah, tetapi turut berperan aktif dalam membentuk wacana publik, membangun kontra-narasi terhadap kebijakan negara, dan mengajukan gagasan kebijakan alternatif. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi digital tidak hanya menjadi ruang reaksi spontan, tetapi juga sarana strategis untuk memengaruhi opini publik dan mendorong diskusi kebijakan ke arah yang lebih bermakna. Dalam konteks gerakan #IndonesiaGelap, partisipasi warga terwujud melalui perpaduan antara issue framing, digital deliberation, dan citizen providing ideas. Issue framing digunakan untuk membingkai ulang isu kebijakan publik dengan oposisi simbolik, metafora emosional, dan kritik satir yang memperkuat legitimasi gerakan.

Digital deliberation hadir dalam bentuk pertukaran opini, penyampaian data, dan koordinasi aksi yang memperluas diskusi publik. Sementara itu, citizen providing ideas tampak dari perumusan 13 tuntutan utama yang menawarkan kebijakan di berbagai sektor strategis serta berbagai tweet yang juga menjelaskan tuntutan, data pendukung, dan usulan solusi warga. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa media sosial berpotensi menjadi ruang demokratis yang mengintegrasikan kritik, diskusi, dan usulan kebijakan. Gerakan #IndonesiaGelap menjadi bukti bahwa partisipasi digital dapat melampaui keterlibatan simbolik, berkembang menjadi kekuatan politik yang signifikan, dan memperluas peran warga menjadi pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perumusan kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulla, R. (2023). Social Media, the Public Sphere, and Public Space in Authoritarian Settings: A Case Study of Egypt's Tahrir Square and 18 Years of User Generated Content. *Social Media + Society*, 9(1), Article 205630512311588. <https://doi.org/10.1177/20563051231158824>
- Aragón, P., Kaltenbrunner, A., Calleja-López, A., Pereira, A., Monterde, A., Barandiaran, X. E., & Gómez, V. (2017). Deliberative platform design: The case study of the online discussions in Decidim Barcelona. In *Lecture Notes in Computer Science* (Vol. 10540, pp. 277–287). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67256-4_22
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Ayu, D. R. (2025, 17 Februari). Ramai Tagar Indonesia Gelap, Apa Maksudnya? *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/ramai-tagar-indonesia-gelap-apa-maksudnya--1208171>
- BBC Indonesia. (2025a, 4 Februari). Larangan penjualan gas elpiji 3 kg secara eceran 'matikan pengusaha kecil dan susahkan konsumen' – Bagaimana cerita warga yang terdampak kebijakan ini? <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c23nzyjz8mko>
- BBC Indonesia. (2025b, 21 Februari). Demo mahasiswa 'Indonesia Gelap' di berbagai daerah bikin 'legitimasi pemerintahan Prabowo oleng'. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgr2yy8ldy4o>

- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). *The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139198752>
- Cammaerts, B. (2015). Social media and activism. In R. Mansell & P. Hwa (Eds.), *The International Encyclopedia of Digital Communication and Society* (pp. 1027–1034). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781118767771.wbiedcs083>
- Casero-Ripollés, A. (2021). Influencers in the political conversation on Twitter: Identifying digital authority with big data. *Sustainability*, 13(5), 2851. <https://doi.org/10.3390/su13052851>
- Djamaluddin, A. R., Hastjarjo, S., & Satyawan, I. A. (2023). Analysis of the symbolic convergence of activism with the hashtag #PercumaLaporPolisi on Twitter social media as a virtual public space. *Journal of Social Interactions and Humanities*, 2(1), 15–26. <https://doi.org/10.55927/jsih.v2i1.2866>
- Dubrow, J. K. (2015). Political inequality is international, interdisciplinary, and intersectional. *Sociology Compass*, 9(6), 477–486. <https://doi.org/10.1111/soc4.12270>
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Fife, K., Flinn, A., & Nyhan, J. (2023). Documenting resistance, conflict and violence: A scoping review of the role of participatory digital platforms in the mobilisation of resistance. *Archival Science*, 23(3), 471–499. <https://doi.org/10.1007/s10502-023-09416-8>
- Fung, A. (2006). Varieties of participation in complex governance. *Public Administration Review*, 66(S1), 66–75. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x>
- Gray, J., Hutchinson, J., & Stilinovic, M. (2023). Democracy in the digital era. *Policy & Internet*, 15(2), 158–161. <https://doi.org/10.1002/poi3.349>
- Hodzi, O., & Zihnioğlu, Ö. (2023). Beyond "networked individuals": Social-media and citizen-led accountability in political protests. *Third World Quarterly*, 45(1), 43–60. <https://doi.org/10.1080/01436597.2023.2219213>
- Hoffmann, M., Liu, J., Neumayer, C., & Trenz, H.-J. (2024). Social media and political contention: Challenges and opportunities for comparative research. *Journal of Information Technology & Politics*, 21(3), 209–217. <https://doi.org/10.1080/19331681.2024.2356435>
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (2025, 22 Januari). *Database Peraturan | JDIH BPK*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025>
- Irwanto, I., Bahfiarti, T., Unde, A. A., & Sonni, A. F. (2025). Social network analysis of information flow and opinion formation on Indonesian social media: A case study of youth violence. *Adolescents*, 5(2), Article 18. <https://doi.org/10.3390/adolescents5020018>
- Jost, J. T., Barberá, P., Bonneau, R., Langer, M., Metzger, M., Nagler, J., Sterling, J., & Tucker, J. A. (2018). How social media facilitates political protest: Information, motivation,

- and social networks. *Political Psychology*, 39, 85–118. <https://doi.org/10.1111/pops.12478>
- Mayring, P. (2014). Qualitative content analysis: Theoretical background and procedures. In A. Bikner-Ahsbabs, C. Knipping, & N. Presmeg (Eds.), *Approaches to qualitative research in mathematics education* (pp. 365–380). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9181-6_13
- McKenzie-Mohr, S., & Lafrance, M. N. (2017). Narrative resistance in social work research and practice: Counter-storying in the pursuit of social justice. *Qualitative Social Work*, 16(2), 189–205. <https://doi.org/10.1177/1473325016657866>
- Momeni, M. (2017). Social media and political participation. *New Media & Society*, 19, 2094–2100. <https://doi.org/10.1177/1461444817728054>
- Papacharissi, Z. (2015). We have always been social. *Social Media + Society*, 1(1), 1–2. <https://doi.org/10.1177/2056305115581185>
- Penney, J., & Dadas, C. (2014). (Re)Tweeting in the service of protest: Digital composition and circulation in the Occupy Wall Street movement. *New Media & Society*, 16(1), 74–90. <https://doi.org/10.1177/1461444813479593>
- Santini, R. M., & Carvalho, H. (2019). The rise of participatory despotism: A systematic review of online platforms for political engagement. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 17(2), 422–437. <https://doi.org/10.1108/JICES-02-2019-0016>
- Schreier, M. (2012). *Qualitative content analysis in practice*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781529682571>
- Siagian, O. I. (2025, 18 Februari). Ini 13 poin tuntutan demo BEM SI "Indonesia Gelap", Apa Saja? *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/ini-13-poin-tuntutan-demo-bem-si-indonesia-gelap-apa-saja--1208489>
- Simon, J., Bass, T., Boelman, V., & Mulgan, G. (2017). *Digital democracy: The tools transforming political engagement*. Nesta. <https://www.nesta.org.uk/>
- Skoric, M. M., Zhu, Q., Goh, D., & Pang, N. (2016). Social media and citizen engagement: A meta-analytic review. *New Media & Society*, 18(9), 1817–1839. <https://doi.org/10.1177/1461444815616221>
- Stromer-Galley, J. (2007). Measuring deliberation's content: A coding scheme. *Journal of Public Deliberation*, 3(1), Article 12. <https://doi.org/10.16997/jdd.50>
- The Conversation. (2025, 20 Februari). Efisiensi anggaran pemerintah Indonesia: Menyelamatkan fiskal atau membebani rakyat? <https://theconversation.com/efisiensi-anggaran-pemerintah-indonesia-menyelamatkan-fiskal-atau-membeban-rakyat-250268>
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.